

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Menejemen Pengembangan Kurikulum

1. 1. Manajemen Kurikulum

Sekolah sebagai organisasi memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan, salah satu aktivitas tersebut adalah manajemen, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Manajemen Kurikulum

Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti malakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda dengan *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan Manajemen. Akhirnya Manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Manajemen atau pengelolaan.¹⁸

Sedangkan menurut Terry & Rue, manajemen secara bahasa adalah pengelolaan atau pengaturan, sedangkan menurut istilah yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan orang lain untuk melaksanakan demi mencapai suatu tujuan.¹⁹

¹⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), Hal: 3 .

¹⁹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma – norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan.²⁰ Menurut Dakir kurikulum itu memuat semua program yang dijalankan untuk menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak terpancang dari segi administrasi saja tetapi menyangkut keseluruhan yang digunakan untuk proses pembelajaran.

Menurut Nurgiantoro, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nurgiantoro menggarisbawahi bahwa relasi antara pendidikan dan kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan.

²⁰ Dakir, 2004, 3

Karena ada tujuan, maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk mencapainya adalah dengan kurikulum.

Suryosubroto (2002; 13) dalam bukunya menerangkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut Ali Al – Khouly, kurikulum diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.

Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen Kurikulum menekankan pada suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktivitas, dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat agar dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar. Kurikulum merupakan upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Proses manajemen dalam kurikulum sangatlah penting agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dan secara tepat dapat mencapai sarannya. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem

pengelolaan kurikulum yang koorperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.²¹

Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau madrasah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau madrasah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Manajemen kurikulum di madrasah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna dalam dunia pendidikan.²² Manajemen kurikulum membicarakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di madrasah sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan di atas, manajemen kurikulum adalah suatu proses yang melibatkan orang lain, untuk mengelola perangkat pada suatu lembaga pendidikan, demi mencapai tujuan yang baik dan dilaksanakan secara terus menerus. Manajemen kurikulum tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

b. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup dari manajemen kurikulum ini ialah perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan

²¹ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3

²² Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: Refiika Aditama, 2010), hlm. 22.

kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang secara umum banyak digunakan di berbagai situasi dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan secara rinci terhadap ruang lingkup manajemen kurikulum sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

1) Perencanaan Kurikulum

Maksud manajemen dalam perencanaan kurikulum ialah keahlian mengelola dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional.

Hamalik menyatakan bahwa dalam perencanaan kurikulum hal pertama yang dikemukakan ialah berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum yang banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.²³

Terdapat dua pendekatan pendekatan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” dan pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*”.²⁴ Pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan

²³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 149.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

kepada instansiinstansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *from the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam hal ini tidak banyak yang dapat dilakukan oleh bawahan dalam melakukan perencanaan kurikulum, karena atasanlah yang memiliki kuasa penuh dalam melakukan perencanaan tersebut. Pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*” yaitu, dimulai dari bawah. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan kurikulum yang melibatkan bawahan bahkan pada tingkat guru-guru untuk dapat bersama-sama memikirkan ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.²⁵ Perencanaan kurikulum menyangkut penetapan tujuan dan memperkirakan cara pencapaian tujuan tersebut.²⁶ Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta

²⁵ Rusman, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²⁶ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 96.

penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.²⁷

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan.

Menurut Hamalik, pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi bagi keberhasilan kurikulum, sebagai berikut:

- a) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber yang diperlukan peserta, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
- b) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang baik berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.²⁸

²⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 171.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

Kepala sekolah sebagai manajer dalam pengembangan kurikulum berperan dalam memberikan perhatian, pembinaan dan bantuan serta memeriksa pekerjaan guru. Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memberikan penilaian dan umpan balik apabila ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Dengan cara ini akan memberikan pengaruh dan dampak bagi guru untuk melakukan persiapan dan perencanaan pembelajaran dengan baik.²⁹

Semua kegiatan manajemen harus didasarkan pada perencanaan yang matang dengan mengukur kemampuan, situasi, dan kondisi. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam perencanaan kurikulum setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi kegiatan pokok, yaitu, perumusan tujuan, perumusan isi, merancang strategi pembelajaran, merancang strategi penilaian. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan

²⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 197.

mempunyai klasifikasi dimulai dari yang umum sampai tujuan khusus. Hal ini diklasifikasikan menjadi 4 tujuan, yaitu:

- a) Tujuan pendidikan nasional, adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan.
- b) Tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan atau kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan program pada lembaga tertentu.
- c) Tujuan kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran.
- d) Tujuan pembelajaran, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekali pertemuan.³⁰

Selanjutnya isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan.³¹ Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan

³⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 194.

³¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, hlm. 161.

psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.

Selanjutnya terdapat strategi pembelajaran atau biasa disebut dengan metode pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.³² Secara operasional strategi pembelajaran adalah prosedur dan metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari lima variabel yakni tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode dan teknik mengajar siswa, guru, dan unsur penunjang. Strategi pembelajaran digunakan dalam setiap aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai.³³

Komponen yang terakhir adalah merancang strategi penilaian atau evaluasi. Sistem penilaian merupakan bagian integral dalam suatu kurikulum yang bertujuan untuk mengetahui

³² Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan*, hlm. 178.

³³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 196.

tingkat keberhasilan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kurikulum.³⁴ Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan.

2) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Rusman memberikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pelajaran, kontinuitas kurikulum yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, keseimbangan bahan pelajaran, dan alokasi waktu yang dibutuhkan.³⁵

Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yakni: (1) Ruang lingkup (*Scope*); Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. (2) Urutan

³⁴ Oemar Hamalik, *Op.Cit.*, hlm. 161.

³⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 60-61.

bahan (*Sequence*); Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan meliputi dua hal yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. (3) Kontinuitas; Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. (4) Keseimbangan; Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar. (5) Integrasi atau keterpaduan; Yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya, setelah siswa menyelesaikan program pendidikan disekolah.³⁶

Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk bentuk organisasi, sebagai berikut:

a) Kurikulum mata pelajaran, yang terdiri dari sejumlah mata

³⁶ Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), hlm. 111.

ajaran secara terpisah.

- b) Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan mata ajaran sejenis.
- c) Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu.
- d) *Core curriculum*, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.³⁷

Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala madrasah. Kepala madrasah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan madrasah.³⁸

3) Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³⁹

Implementasi kurikulum mencakup tiga tahapan pokok yaitu: (1) Pengembangan program, mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program

³⁷ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 137.

³⁸ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 197.

³⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, hlm. 97.

remedial. (2) Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. (3) Evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya. (2) Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. (3) Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran.⁴⁰

Kepala sekolah dalam tahap ini bersama-sama guru membuka diri terhadap masukan atau kritik yang membangun yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum. Sebagai guru harus siap untuk diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Begitu pun kepala sekolah harus

⁴⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 175.

memiliki jadwal yang jelas dan rinci untuk melakukan supervisi terhadap kinerja guru, hasil supervisi kepala sekolah menjadi fakta dan data yang benar untuk memberikan informasi kepada guru berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya selama di sekolah.

4) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴¹

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk perbaikan program, bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, diperlukan semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut baik yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Tujuan ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam melainkan lebih merupakan suatu 'keharusan' dari luar. Penentuan tindak

⁴¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 199.

lanjut hasil pengembangan, tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan: pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebar luaskan ke dalam sistem yang ada. Kedua, dalam kondisi yg bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan diperlukan kegiatan evaluasi kurikulum.

Kepala sekolah berperan penting dalam kegiatan evaluasi kegiatan. Pengembangan kurikulum yang telah direncanakan, dikoordinasikan dilaksanakan dan telah melalui pengawasan kepala sekolah sendiri lan sehingga kepala sekolah mampu melakukan evaluasi yang dibantu oleh para staf. Cocok kah pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan, kemudian mencari tahu hambatan dan pendorong terlaksananya pengembangan kurikulum. Sehingga kepala sekolah beserta bawahannya bekerja sama untuk melakukan perbaikan pengembangan kurikulum di tahun berikutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang telah dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan atau keberhasilan pendidikan yang telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program,

bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak diluar pendidikan.

Sedangkan menurut Terry, terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan/ pengarahan) dan controlling (pengendalian).⁴²

a. Planning (*perencanaan*)

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendakinya, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.⁴³

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa (what) yang dilakukan, bagaimana (how) cara melaksanakannya, kapan (when) pelaksanaannya, dan siapa (who) yang bertanggung jawab, dan berapa anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen yang lain.⁴⁴

Jadi perencanaan dalam manajemen bimbingan dan konseling perlu dilakukan, yaitu sebagai patokan dalam melaksanakan

⁴²Mulyono, *Op.cit*, 22-23.

⁴³Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), hlm. 49.

⁴⁴Lasa SH, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Pinus Book, 2007), hlm. 23.

kegiatan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa. Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁵

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Terry pelaksanaan (*actuating*) adalah merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Pemimpin yang efektif menurut Hoy dan Miskel cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung (*suportif*) dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Keefektifan kepemimpinan menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral kerja dan kontribusi wujud kerja.⁴⁶

Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan personel sehingga semua program kerja institusi dapat terlaksana. Selain itu, dibutuhkan strategi, terutama strategi kepemimpinan dengan mengoptimalkan seluruh

⁴⁵Siagian S.P, *Teoridan Praktik Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), hlm. 81-82.

⁴⁶Syaful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 52-53.

sumber daya yang dimiliki⁴⁷

d. Pengawasan (*Controlling*)

Franklin Moove memberikan arti pengawasan sebagai tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Dalam hal ini kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Terry mengartikan pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasi pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana. Prinsip dasar yang menjadikan kunci dalam system pengawasan adalah umpan balik (*feedback*). Dalam pengertian lain Sondang Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.⁴⁸

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan kurikulum dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan dan pemberlakuan kurikulum itu.

⁴⁷Pawit Yusuf, *Komunikasi Instruksional: TeoridanPraktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2010), hlm. 101.

⁴⁸George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), hlm. 101.

Ruang lingkup di atas, sesuai dengan pendapat E. Mulyasa tentang Manajemen Pendidikan. Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai suatu proses untuk visi menjadi aksi.⁴⁹

c. Prinsip-prinsip Manajemen Kurikulum

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:⁵⁰

- 1) Produktivitas. Artinya, manajemen kurikulum harus mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Yaitu, hasil belajar siswa harus sesuai dengan tujuan kurikulum.
- 2) Demokratisasi. Artinya, posisi pengelola, pelaksana, dan subyek didik seharusnya dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Kooperatif. Artinya, dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
- 4) Efektivitas dan efisiensi. Artinya, untuk mencapai tujuan kurikulum, manajemen kurikulum harus memberikan hasil yang

⁴⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.7.

⁵⁰ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4-5.

berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.

- 5) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Artinya, manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan megarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

1. 2. Pengembangan Kurikulum

a. Definisi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Pesatnya perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Munculnya perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma baru dalam proses pengembangan kurikulum. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang memerlukan persiapan dari generasi muda dan siswa yang harus memiliki kompetensi multidimensional. Mengacu pada hal-hal tersebut, pengembangan kurikulum harus mampu mengantisipasi segala persoalan yang dihadapi masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga nilai-nilai pendidikan dapat bernilai fungsional.

Definisi pengembangan kurikulum (*curriculum development*) menurut Audrey Nichollas & S. Howard Nichools adalah *the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in*

pupils and assesment of the extent to wich these changes have taken place. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa.⁵¹

Dengan demikian, sesungguhnya pengembangan kurikulum adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir, yang terdiri dari tiga unsur yaitu:⁵²

- 1) Tujuan, yaitu mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pembelajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran (*subject course*) maupun kurikulum secara menyeluruh.
- 2) Metode dan materialis, yaitu mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh guru.
- 3) Penilaian (*assesment*), yaitu menilai keberhasilan pekerjaan yang telah diperoleh, yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya.

Berdasarkan beberapa definisi manajemen kurikulum, dan juga pengembangan kurikulum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian “manajemen pengembangan kurikulum” adalah segenap proses usaha bersama

⁵¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, hlm. 96-97.

⁵² *Ibid.*, hlm. 97.

untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran yang meliputi perencanaan, penerapan, dan evaluasi pengembangan kurikulum secara komprehensif.

b. Landasan Pengembangan Kurikulum

Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, serta landasan perkembangan ilmu dan teknologi.

1) Landasan Filosofis

Filsafat dan ilmu mempunyai hubungan yang saling mengisi dan melengkapi (komplementer). Filsafat memberi landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat memberikan bahan-bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Filsafat pendidikan berlandaskan pada tiga cabang filsafat umum. Yaitu, *metafisika* yang membahas tentang segala yang ada di alam ini, *epistemologi* yang membahas tentang kebenaran, dan *aksiologi* yang membahas tentang nilai-nilai.⁵³

Menurut Fazlur Rahman, mengembangkan ilmu bertolak dari iman, Islam dan takwa. Keimanan bukan dipupuk dogmantis, melainkan dipupuk secara rasional. Bukan *rasional positivistik* yang hanya mengakui kebenaran empirik sensual, tetapi *rasional ontologik* yang mengakui kebenaran *sensual, logik, dan etik*; yang

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 39.

aksiologik, mengakui nilai-nilai *sensual, logik dan transcendental*; dan yang *epistimologik*, yang menggunakan pembuktian kebenaran yang bukan hanya menjangkau yang *sensual logik* saja. Melainkan juga menggunakan metode berpikir yang mampu menjangkau kebenaran *etik* dan kebenaran *transcendental*.⁵⁴

Dimensi *ontologi*, mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi siswa untuk berhubungan langsung dengan fisik obyek-obyek serta berkaitan dengan pelajaran yang mengarahkan pada benda-benda dan materi-materi kerja. Dimensi *epistemologi*, mengarahkan perwujudan kurikulum berdasarkan metode konstruktif pengetahuan yang disebut dengan metode ilmiah yang sifatnya mengajarkan berfikir menyeluruh, reflektif, dan kritis. Dimensi *aksiologi*, mengarahkan pembentukan kurikulum yang dapat memberikan kepuasan pada siswa untuk memiliki nilai-nilai yang mereka perlukan, untuk hidup dengan baik dan menghindarkan nilai-nilai yang tidak diinginkan.⁵⁵

2) Landasan Yuridis

Setiap pendidikan formal sudah dipastikan akan dikelola oleh badan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk kurikulum yang digunakan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mengacu pada landasan yuridis yang telah ditetapkan. Adapun landasan yuridis

⁵⁴ Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm.113-114.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 123-124

yang diberlakukan di Indonesia adalah *pertama*, UUD 1945 dan perubahannya Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31. *Kedua*, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. *Ketiga*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. *Keempat*, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. *Kelima*, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. *Keenam*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. *Ketujuh*, Standar Isi yang ditetapkan dengan Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006. *Kedelapan*, Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dalam Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006. *Kesembilan*, Pelaksanaan Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 dan Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006 dan regulasi yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 ayat (1) yang meliputi: a) standar isi; b) standar proses; c) standar kompetensi lulusan; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; e) standar sarana dan prasarana; f) standar pengelolaan; g) standar pembiayaan; dan h) standar penilaian pendidikan.⁵⁶

⁵⁶ Rahmad Raharjo, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, hlm. 30.

3) Landasan Psikologis

Minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Hal ini sangat diperlukan baik dalam merumuskan tujuan, menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran, serta sistem penilaian.

a) Psikologi Perkembangan

Prinsip ini berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan siswa, terhadap kematangan, bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, proses belajar, pengamatan terhadap sesuatu, dan lain-lain yang berkaitan dengan keadaan psikologis siswa.⁵⁷

b) Psikologi Belajar

Psikologi belajar mempunyai asumsi bahwa hakekat anak itu dapat dididik dan diberikan sejumlah materi dan pengetahuan. Di samping itu anak dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma dan dapat mempelajari keterampilan-keterampilan.⁴⁰

Untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

kurikulum dapat memberi peluang pada siswa, dan seperti apa mereka dapat memperoleh hasil yang terbaik. Pada dasarnya kurikulum disusun dalam rangka memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan siswa. Keberhasilan menyelesaikan suatu tugas merupakan titik tolak keberhasilan mengerjakan tugas-tugas berikutnya.

4) Landasan Sosial Budaya

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam arti yang lebih mendasar, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Setiap generasi manusia menempatkan dirinya dalam urutan sejarah kebudayaan. Menurut Israel Scheffler, melalui pendidikan, manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban masa sekarang, dan turut menentukan peradaban masa yang akan datang.⁵⁸

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926 organisasi tersebut sangat memperhatikan pendidikan terutama dengan keberadaan pondok Pesantren. Seiring dengan perkembangannya, NU telah mendirikan divisi pendidikan yang sangat terorganisir dan tetap berada dalam naungan NU yang diberi nama lembaga pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU). Lembaga ini merupakan

⁵⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, hlm. 60

salah satu aparat Departementasi di lingkungan NU dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan.

Budaya NU juga terus memberikan pemahaman dengan mengenalkan warisan budaya di kalangan Ahlusunnah Waljamaah dalam bentuk bacaan-bacaan atau pelajaran madrasah, kesenian-kesenian, dan lain-lain khususnya bagi anak didik dan generasi muda, misalnya melalui pelajaran ke-NU-an yang banyak membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan NU.

Hal tersebut tentu tak lepas dari kurikulum yang memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi siswa, dan dalam rekonstruksi sosial masyarakat. Isi kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada saat siswa mengalami proses pendidikan maupun pada saat mereka terjun langsung dalam kehidupan masyarakat secara luas.⁵⁹

5) Landasan Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah menimbulkan banyak perubahan dalam nilai-nilai, baik nilai sosial, budaya, spiritual, intelektual, maupun material. Perkembangan ini juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, dan sikap hidup baru. Hal tersebut menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan.

⁵⁹ Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, hlm. 126.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung menuntut perkembangan pendidikan. Pengaruh langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberikan isi/materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Pengaruh yang tidak langsung adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menimbulkan masalah-masalah baru yang menuntut pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan baru yang dikembangkan dalam pendidikan.⁶⁰

c. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum menempati kedudukan dan fungsi sentral dalam sistem pendidikan nasional, maka dalam melakukan pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dasar-dasar pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yaitu:⁶¹

- 1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional.
- 2) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan.
- 3) Kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.
- 4) Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan

⁶⁰ Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, hlm. 127.

⁶¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, hlm. 98-99.

atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.

- 5) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi, sesuai dengan kebutuhan potensi, minat siswa, tuntutan pihak-pihak yang memerlukan, dan berkepentingan.
- 6) Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, serta kebutuhan pengembangan iptek dan seni.
- 7) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi, sesuai dengan tuntutan lingkungan dan budaya setempat.
- 8) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika, dan rasa kebangsaan.

d. Prinsip – Prinsip Pengembangan Kurikulum

Menurut Oemar Hamalik bahwa pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan- pertimbangan multidimensional, diantaranya: *Pertama*, konsep dan pendekatan dalam ilmu manajemen memberikan teoritik dan fundamental bagi pengembangan kurikulum. Itu sebabnya konseptual teoritik ilmu manajemen dijadikan landasan penting bagi pengembangan

kurikulum. *Kedua*, pola dan alur berpikir yang sinkron antara keduanya. Proses pengembangan tersebut sejalan dengan proses manajemen. *Ketiga*, implementasi kurikulum sebagai bagian integral dalam pengembangan kurikulum membantukan konsep – konsep, prinsip – prinsip dan prosedur, serta pendekatan dalam manajemen dan lain – lain.

Prinsip – prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah – kaidah atau hukum – hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Nana Syaodih Sukmadinata menyetengahkan prinsip – prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut:

- 1) Prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di dalam, yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen – komponen kurikulum, tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen – komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.
- 2) Prinsip Fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memilih sifat luwes, lentur dan fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, kondisi tempat dan waktu yang berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa.
- 3) Prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum,

perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus – putus.

- 4) Prinsip praktis. Adanya prinsip kurikulum yang mudah dilaksanakan, menggunakan alat – alat yang sederhana dengan biaya yang murah dan dapat mencapai hasil yang optimal. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi.
- 5) Prinsip efektivitas. Adanya usaha agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dan berhasil baik secara kualitas maupun kuantitas.

e. Unsur Utama Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen atau unsur utama tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen, yaitu: komponen tujuan, materi/isi kurikulum, metode/strategi pembelajaran, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu.⁶² Berikut adalah komponen-komponen kurikulum:

1) Tujuan

Komponen tujuan yaitu arah/sasaran yang hendak dituju oleh

⁶² Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op. cit.*, hlm. 46.

proses penyelenggaraan pendidikan.⁶³ Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan sangat penting dan strategis, karena akan mengarahkan dan memengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai tujuan yang paling umum hingga tujuan khusus yang dapat diukur. Hal tersebut sering dinamakan kompetensi.⁶⁴

Tujuan kurikulum di bagi menjadi empat yaitu:

a) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

TPN adalah tujuan umum yang sarat dengan muatan filosofis. TPN merupakan sasaran akhir yang harus di jadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan artinya setiap lembaga dan penyelenggaraan itu, baik pendidikan yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya di rumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang di rumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan.

Secara jelas tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sitem nilai pancasila di rumuskan dalam undang-undang

⁶³ Muhammad Rahman, *Kurikulum Berkarakter: Refleksi dan Proposal Solusi Terhadap KBK dan KTSP*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 4.

⁶⁴ Hasan Basri, *Op. cit.*, hlm. 150.

No.20 tahun 2003, pasal 3, yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan seperti dalam rumusan di atas, merupakan rumusan tujuan yang sangat ideal yang sulit untuk direalisasikan dan diukur keberhasilannya. Memang sulit untuk mencari ukuran dari tujuan yang ideal. Oleh karena kesulitan itulah, maka tujuan pendidikan yang bersifat umum itu perlu dirumuskan lebih khusus.

b) Tujuan Institusional (TI)

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Seperti misalnya

Standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

Berikut contoh tujuan institusional, seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan Bab 5 pasal 26 yang menjelaskan bahwa Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

c) Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus di capai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. tujuan kurikuler dapat di

definisikan sebagai kualifikasi yang harus di miliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan.tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan.dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan di arahkan untuk mencapai tujuan konstisional.

Pada peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan pasal 6 dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan,dan khusus pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas:

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika.
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan.

Badan standar nasional pendidikan kemudian merumuskan tujuan setiap kelompok mata pelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 sebagai berikut;

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bertujuan bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia.tujuan tersebut di capai melalui muatan dan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu

pengetahuan dan ternologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan mengembangkan logika,kemampuan berfikir dan aanlisis peserta didik.
- 4) Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/paket A.B.C. tujuan ini dicapai melalui muatan daan atau kegiatan bahasa, matematika, IPA, IPS, keterampilan/kejuruan, dan atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- 5) Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini di capai melalui muatan dan atau kegiatan bahasa, matematika, IPA, IPS, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- 6) Kelompok mata pelajaran estetika bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.tujuan ini di capai melalui muatan dan kegiatan bahsa, seni budaya,keterampilan,dan muatan lokal yang relevan.
- 7) Kelompok mata pelajran jasmani,olahraga dan kesehtan

bertujuan mambentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani.

d) Tujuan Pembelajaran atau Instruksional (TP)

Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus.tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang di harapkan dapat di miliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses merupakan syarat mutlak bagi guru.⁶⁵

2) Isi/Materi

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.⁶⁶

3) Metode/Strategi

Metode/strategi adalah komponen yang sangat penting dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran juga merupakan rekayasa atau cara-cara yang digunakan dalam mengaktualisasikan isi/materi dari sebuah kurikulum untuk dapat mengarah pada tujuan yang telah

⁶⁵ Sanjaya,Wina. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Krikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada. Hal. 106-117

⁶⁶ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op. cit.*, hlm. 53.

ditentukan.⁶⁷ Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa metode/strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Metode/strategi meliputi rencana, metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode/strategi pembelajaran merupakan hal penentu keberhasilan pencapaian suatu tujuan melalui pelaksanaan proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berikut penjelasan dari tiap-tiap kegiatan.

a) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik sebaiknya:

- (1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- (2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional;
- (3) Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

⁶⁷ Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 55.

⁶⁸ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op. Cit.*, hlm. 53

- (4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- (5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik, tematik terpadu, scientific, inquiry dan penyingkapan (*discovery*), dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

(1) Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan.

(2) Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga mencipta. Untuk memperkuat pendekatan scientific, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan

untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

(3) Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan tersebut harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/ inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

(1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;

- (2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- (3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- (4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

d) Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran, tes juga harus memiliki dua kriteria yaitu validitas dan reliabilitas. Sedangkan non tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa

jenis non tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian.⁶⁹

Komponen / unsur utama merupakan bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu.

f. Paparan Tugas Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah

Tim Pengembangan Kurikulum (TPK). Pengembangan kurikulum ternyata mempunyai rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama. Ketika pengembang kurikulum tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditetapkan akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kualitas pendidikan tidak mencapai hasil yang maksimal.

1) Penanggung Jawab: Ketua Yayasan

- a) Memberikan kebijakan-kebijakan untuk memperlancar kegiatan
- b) Mengadakan kontrol terhadap kegiatan
- c) Mengevaluasi kegiatan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 56-58.

2) KETUA : Kepala sekolah

- a) Menkoordinir seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Menganalisis anggaran pengembangan sekolah
- c) Membantu kepala sekolah dalam memberikan evaluasi kegiatan

3) BIDANG KURIKULUM : Guru

- a) Menyiapkan program kurikulum.
- b) Memantau pelaksanaan kegiatan kurikulum
- c) Membuat matriks pengembangan kurikulum
- d) Menyusun jadwal kegiatan kurikulum

4) BIDANG SARANA DAN PRASARANA : Guru

- a) Menyiapkan program sarana dan prasarana
- b) Menginventarisir barang yang ada.
- c) Menginventarisir barang yang diperlukan.
- d) Memnyusun Anggaran pengadaan / belanja barang
- e) Membuat matriks pengembangan sarana dan prasarana
- f) Menyusun jadwal kegiatan sarana dan prasarana

5) BIDANG KESISWAAN: Guru

- a) Menyiapkan program kesiswaan,
- b) Menyiapkan program ekstrakurikuler
- c) Menyiapkan penanganan kedisiplinan siswa

6) BIDANG HUMAS: Guru

- a) Menyiapkan program Humas,
- b) Merencanakan Rapat dengan Komite Sekolah
- c) Mendokumentasikan Hasil Rapat Sekolah maupun rapat dengan Komite,

7) BIDANG KETATAUSAHAAN : Pegawai TU

- a) Menyiapkan program ketatausahaan
- b) Menyiapkan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c) Menyusun anggaran keuangan sekolah

8) KOMITE SEKOLAH

- a) Memberikan input materi/ non materi kepada sekolah,
- b) Melakukan evaluasi bersama dengan sekolah, tentang kualitas pendidikan.

9) KOORDINATOR MGMP SEKOLAH

- a) Menyiapkan program pengajaran
- b) Menyiapkan pelaksanaan pengajaran,
- c) Menyiapkan evaluasi pembelajaran,
- d) Menyiapkan program tindak lanjut.

2. Konsep Dasar Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal

a. Pengertian Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal

Kurikulum nasional merupakan panduan atau acuan seluruh lembaga pendidikan yang ada. Kurikulum ini disusun dan dikembangkan pemerintah melalui Pusat Kurikulum Departemen

Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum mandiri atau kurikulum berciri khas khusus adalah kurikulum nasional yang oleh lembaga pendidikan swasta, lembaga yang didirikan organisasi keagamaan maupun masyarakat dan yayasan telah dikombinasikan sedemikian rupa, sehingga terdapat ciri khasnya secara khusus. Sekadar contoh, kurikulum sekolah Muhammadiyah, Kurikulum Sekolah Islam Terpadu, Kurikulum Sekolah Ma'arif (Nahdlatul Ulama), Kurikulum Pondok Pesantren, dan lain sebagainya. Masing-masing kurikulum tersebut akan berbeda-beda karena mempunyai ciri khas yang khusus, sesuai dengan visi misi lembaga pendirinya. Tetapi, semua bentuk kurikulum berciri khas khusus tersebut tetap menginduk pada kurikulum nasional.

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa.⁷⁰

Isi dalam pengertian di atas adalah bahan pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal. Sedangkan media penyampaiannya merupakan metode dan sarana yang digunakan dalam penyampaian muatan lokal.

Lingkungan alam yang dimaksud di sini adalah lingkungan hidup dan tidak hidup yang mencakup komponen hewan dan tanaman

⁷⁰ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Bandung: Ciputat Press, 2003), hlm. 59.

beserta tempat tinggalnya, dan hubungan timbal balik antara komponen tersebut. Jadi dalam lingkungan alam terdapat ekosistem antara lain: sungai, hutan, sawah, dan sebagainya.

Lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan yang mencakup hubungan timbal balik (interaksi) antara manusia satu dengan yang lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut.

Lingkungan budaya yang dimaksud adalah lingkungan yang mencakup segenap unsur budaya yang dimiliki masyarakat di suatu daerah tertentu.⁷¹

Kurikulum mata pelajaran muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.⁷² Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁷² Zainal Arifin, *Op. cit.*, hlm. 206.

peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kurikulum muatan lokal merupakan suatu pelaksanaan program kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional, yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan setempat dan ciri khas masyarakat tersebut.

b. Dasar dan Tujuan kurikulum Muatan Lokal

Landasan filosofis diberlakukannya kurikulum baru tersebut adalah dalam rangka untuk lebih merespon tuntutan reformasi, globalisasi, dan otonomi daerah.

Dari perubahan kurikulum yang terjadi banyak perubahan yang menyangkut kurikulum pendidikan 1994 yang bercirikan muatan lokal. Dalam kurikulum 2004 muatan lokal dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk desentralisasi pendidikan. Daerah diberi kewenangan menentukan sendiri kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, dengan adanya dukungan dari masyarakat.

Muatan lokal, yang berlandaskan kekuatan dan kebutuhan daerah, tetapi yang mendukung tujuan pembangunan nasional dan berwawasan global, dapat mengantarkan anak yang mampu bersaing dalam kehidupan global.

Gagasan muatan lokal dulunya merupakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan yang berkenaan dengan kurikulum sekolah.

Arti dari kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan.

Muatan lokal dalam kurikulum mempunyai landasan sebagai berikut:

a. Landasan idiil

UUSPN tahun 2003 pasal yang berbunyi: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- (1) pendidikan agama;
- (2) pendidikan kewarganegaraan;
- (3) bahasa;
- (4) matematika;
- (5) ilmu pengetahuan alam
- (6) ilmu pengetahuan sosial;
- (7) seni dan budaya;⁷³

b. Landasan demografik

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beraneka ragam adat-istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, seni dan budaya serta kondisi alam dan sosial yang juga beraneka ragam. Hal itu perlu diupayakan kelestariannya agar tidak musnah. Upaya pelestarian tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial dan budaya

⁷³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tentang Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, hlm. 25

peserta didik sedini mungkin.⁷⁴

Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal kita harus benar-benar memperhatikan dari karakteristik lingkungan daerah dan juga kebutuhan daerah tersebut. Adapun lingkungan peserta didik disini terdiri atas:

1) Lingkungan alam phisik yang terdiri atas:

- a) Lingkungan phisik alami, misalnya: daerah rural, urban, semi rural, dan semi urban.
- b) Lingkungan phisik buatan, misalnya: lingkungan dekat pabrik, pasar, pariwisata, jalan besar, pelabuhan dan sebagainya.

2) Lingkungan masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat ini menurut A. Sigit terdapat dalam tujuh lapangan hidup, yaitu:

- a) Masyarakat yang hidup dalam bidang ekonomi, misalnya perdagangan, pertanian, kerajinan, peternakan, perikanan, perkebunan, transportasi, jasa, dan sebagainya.
- b) Masyarakat yang hidup dalam bidang politik, misalnya: sebagai pimpinan anggota partai, pimpinan lembaga baik pemerintah maupun swasta dan sebagainya.
- c) Masyarakat yang hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya: guru, peneliti, ahli-ahli tertentu, pengarang, atau

⁷⁴ Abdullah Idi, *Op. Cit.*, hlm. 177-178.

pencipta dan sebagainya. Landas Masyarakat yang hidup dalam bidang keagamaan (dalam muatan lokal misalnya: berbagai kegiatan perayaan hari besar agama, adat istiadat, kebiasaan–kebiasaan, dan sebagainya).

- d) Masyarakat yang hidup dalam bidang olah raga, kurikulum dalam muatan lokal misalnya berbagai permainan daerah.
- e) Masyarakat yang hidup dalam bidang kekeluargaan, kurikulum dalam muatan lokal, misalnya: gotong royong, silaturahmi, dan sebagainya.⁷⁵

Keterpaduan antara lingkungan alam dan masyarakat pada hakekatnya membentuk kehidupan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang disebut pola kehidupan. Jadi, pola kehidupan disini mencakup interaksi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya baik secara formal maupun non formal. Pola kehidupan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan alam dan lingkungan budaya.

Secara umum program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas

⁷⁵ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 102

sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat.⁷⁶

Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar maka besar kemungkinan murid dapat mengamati, melakukan percobaan kegiatan belajar sendiri. Belajar mencari, mengolah, menemukan informasi sendiri dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungannya merupakan pola dasar dari belajar.⁷⁷

c. Sumber Bahan Pelajaran Muatan Lokal

Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, kemungkinan materi muatan lokalnya lebih besar, lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi. Dengan kebijaksanaan itu diharapkan daerah dan sekolah dapat menambahkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah serta masyarakat sekitarnya, sehingga dengan adanya hal itu memungkinkan terjadinya perbedaan muatan kurikulum muatan lokal antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.

Muatan lokal bukan suatu mata pelajaran, tetapi lebih merupakan bahan kajian. Artinya, setelah sekolah berkonsultasi dengan instansi induknya, sekolah dapat mengisi muatan lokal dengan beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.⁷⁸

⁷⁶ Syafruddin Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 62.

⁷⁷ Abdullah Idi, *Op. Cit.* hlm. 181

⁷⁸ Sam M. Chan Dan Tuti T. Chan, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 195.

Sesuai dengan adanya berbagai sumber bahan ajaran, sumber bahan muatan lokal dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

1) Nara sumber

- a) Guru itu sendiri yang mungkin mempunyai berbagai pengalaman dan berbagai ketrampilan.
- b) Peserta didik itu sendiri: yaitu berbagai keahlian dan beberapa keterampilan bawaan dari rumah.
- c) Nara sumber yang lain yang ada di sekitar yang mungkin dapat didatangi maupun didatangkan.

2) Software

Yaitu suatu sumber bahan yang terdapat pada berbagai tulisan, misalnya buku cara bertanam, beternak, cara membuat kerajinan dan sebagainya. Mungkin juga berupa berbagai film dokumentasi yang sengaja dibuat untuk berbagai sumber bahan muatan lokal.

3) Hardware

Yaitu suatu bahan ajaran yang sifatnya dapat diamati dan dapat diraba, misalnya berbagai alat upacara daerah dan berbagai peralatan.

4) Lingkungan

Berbagai sumber bahan muatan lokal yang ada di sekitar yang biasanya bersifat historis, misalnya: monumen, adat istiadat, dan sebagainya.

- 5) Berbagai hasil diskusi oleh berbagai pakar atau nara sumber yang relevan

Untuk penentuan bahan selanjutnya perlu adanya pemetaan daerah muatan lokal untuk mengidentifikasi berbagai jenis muatan lokal yang ada. Bahan muatan lokal telah ditetapkan oleh Depdikbud sebesar 20% dari bahan kurikulum keseluruhan.⁷⁹

d. Metode Dalam Proses Pembelajaran Muatan Lokal

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.

Jadi, Untuk mendorong keberhasilan guru dalam proses pembelajaran dibutuhkan adanya metode yang tepat, yang mana memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kompetensi, yang bisa terbentuk sesuai kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam memilih suatu metode mengajar tergantung pada:

⁷⁹ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 103-104.

1) Jumlah siswa

Siswa akan terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka. Kemungkinan besar pilihan siswa putri akan lain dengan pilihan siswa putra.

2) Sifat bahan

Bahan muatan lokal akan mempunyai ciri khas kalau dibandingkan dengan bahan di luar muatan lokal. Diantaranya ciri-ciri tersebut adalah:

- (1) Luas dan urutan bahan tidak kaku.
- (2) Sebagian besar bahan ajaran pelaksanaannya dapat diberikan secara ekstra kurikuler.
- (3) Guru terdiri atas berbagai nara sumber yang mungkin tidak berprofesi guru.
- (4) Sebagian besar bahan muatan lokal dapat dilaksanakan dengan metode: karya wisata, *drill*, demonstrasi, *learning by doing*, dan dapat dilaksanakan dengan mengikuti kursus di luar sekolah.

3) Media yang tersedia

Karena bahan beraneka ragam maka perlu adanya berbagai media. Misalnya: alat pertukangan, pertanian, bengkel dan sebagainya. Oleh karenanya perlu ditopang dana yang cukup.

4) Kesiapan guru

Di lembaga pendidikan guru tidak ada mata kuliah praktik muatan lokal. Kiranya perlu adanya penataran buat guru-guru yang akan mengajar bahan muatan lokal.⁸⁰

5) Waktu pelaksanaan

Muatan lokal tidak lagi disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai, tapi lebih diintensifkan yakni menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib maupun pilihan.⁸¹

6) Situasi

Situasi setempat memang kadang-kadang bersifat situasional dan kondisional dan kadang-kadang ada daerah yang kaya akan bahan muatan lokal dan kadang-kadang ada kota-kota besar yang sulit menentukan bahan muatan lokalnya, terutama untuk daerah-daerah elit. Sebab ada kemungkinan anak-anak pada daerah tersebut tidak akan tertarik pada bahan muatan lokal.⁸²

Dalam proses belajar mengajar, E. Mulyasa menawarkan metode-metode sebagai berikut:⁸³

1) Metode Demonstrasi

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 106-107.

⁸¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi Dan Implementasi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 40

⁸² Dakir, *Op. Cit.* hlm. 108

⁸³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 107-116.

Dengan metode ini guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja alat kepada siswa.

a) Metode inquiry

Yaitu metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sendiri dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan antara penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan peserta didik yang lain.

b) Metode Penemuan

Penemuan merupakan metode yang menekankan pada pengalaman langsung, dan lebih mengutamakan proses dari pada hasil.

c) Metode Eksperimen

Merupakan metode yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan dan peralatan laboratorium, baik secara kelompok ataupun individual.

d) Metode Karya Wisata

Metode karya wisata merupakan perjalanan yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama pengalaman secara langsung dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah.

e) Metode Ceramah

Dengan metode ini guru menyajikan bahan melalui penuturan atau penjelasan secara langsung.

f) Metode Problem Solving

Metode pemecahan masalah merupakan suatu metode pengajaran yang mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan persoalan-persoalan.

e. Evaluasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal

Evaluasi dalam pelaksanaan muatan lokal merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada peserta didik. Adapun evaluasi hasil belajar muatan lokal yaitu antara lain:

1) *Reflective Evaluation*

Reflective evaluation pada muatan lokal yang dievaluasi program muatan lokal sebelum dilaksanakan di lapangan. Oleh karena yang dievaluasi adalah konsepnya yang berdasar landasan teori, pengalaman-pengalaman, berbagai hasil penelitian, argumentasi, pengarahan para pakar, dan para pejabat, acuan dari berbagai sumber dan sebagainya, yang kemudian melahirkan Surat Keputusan Mendikbud No. 0412/U/1987 tertanggal 11 Juli 1987.

2) *Formative Evaluation*

Formative evaluation pada program muatan lokal yaitu mengevaluasi pada program muatan lokal pada waktu program tersebut baru dilaksanakan.

3) *Summative Evaluation*

Summative evaluation dalam muatan lokal ialah mengevaluasi setelah program tersebut selesai dilaksanakan secara menyeluruh. Yang dievaluasi ialah berbagai kegiatan yang ada pada program tersebut disesuaikan dengan tujuan program muatan lokal yang telah digariskan sebelumnya.⁸⁴

Untuk evaluasi hasil belajar muatan lokal mencakup perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan berkenaan dengan materi muatan lokal, dampak pengajaran muatan lokal bagi kepentingan anak dan masyarakat setempat, daya dukung terhadap pembangunan daerahnya. Di lain pihak penilaian terhadap hasil belajar muatan lokal bisa dilakukan seperti halnya penilaian bidang studi dalam kurikulum nasional.⁸⁵

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum 2004 dapat dilakukan dengan penilaian berbasis kelas, tes kemampuan dasar, ujian berbasis sekolah, benchmarking, penilaian program, dan portofolio.

1) Penilaian Berbasis Kelas atau *Classroom Based Evaluation*

Penilaian berbasis kelas merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian ini dilaksanakan

⁸⁴ Dakir, *Op. Cit.* hlm. 114-115.

⁸⁵ Nana Sudjana, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), hlm. 178-179

secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu disebut penilaian berbasis kelas.⁸⁶

Penilaian berbasis kelas dapat dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan. Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dan dilaksanakan secara bersama-sama baik tingkat rayon, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan.⁸⁷

2) Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan Dasar dilakukan untuk mengetahui kompetensi dasar peserta didik, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Tes ini dilakukan setiap tahun.⁸⁸

3) Ujian Berbasis Sekolah atau School Based Exam

Ujian berbasis sekolah dapat dilakukan pada setiap akhir jenjang sekolah, untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu, dan keberhasilan sekolah secara keseluruhan.

4) Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai

⁸⁶ Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Balitbang Depdiknas, tth), hlm. 2

⁸⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103-104

⁸⁸ *Ibid.*

suatu keunggulan yang memuaskan. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian benchmarking tertentu dapat dipakai untuk memberikan peringkat kelas dan tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik.

5) Penilaian Program

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan jaman.

6) Portofolio

Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.⁸⁹

⁸⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 178

B. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi penelitian terdahulu adalah membandingkan dan menyatakan bahwa tesis ini mempunyai perbedaan dengan penulisan yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan dalam penulisan. Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

Al Musanna menulis artikel dalam Jurnal Pendidikan Vol 10 No 2 Oktober 2009 dengan judul "*Pengembangan Kuruikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan di Aceh*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melalui pembelajaran muatan lokal diharapkan peserta didik tidak saja memiliki pengetahuan akademis sebagaimana diharapkan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai sosia kultural yang melingkupinya. Namun dalam pelaksanaannya, mata pelajaran muatan lokal mempunyai kompleksitas tersendiri.⁹⁰

Chusnul Azhar (2015), dalam tesisnya yang berjudul, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kader di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta". hasilnya menunjukka bahwa Kehidupan sebuah organisasi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kaderisasi, karena pada hakikatnya proses perkaderan merupakan sebuah upaya sistematis untuk meningkatkan loyalitas dan kualitas pelaku gerakan. Selain itu juga karena tidak terlepas dari nilai-nilai historisitas latar belakang berdirinya Madrasah

⁹⁰ Al Musanna, Jurnal Pendidikan Vol 10 No 2 Oktober 2009, *Pengembangan Kuruikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan di Aceh*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2009).

Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.⁹¹

Siswanto (2011), mahasiswa Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI) Program Studi Pendidikan Islam PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis dalam tesis dengan judul: *Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi Sekecamatan Sewon Bantul Yogyakarta*. Tesis ini menjelaskan tentang proses pengembangan kurikulum sekolah inklusi, yang dilihat dengan menggunakan paradigma fungsi-fungsi manajemen pengembangan kurikulum beserta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, perakuan yang diberikan sekolah inklusi sekecamatan Sewon terhadap anak ABK, berlainan kepercayaan, suku, dan lainnya disesuaikan dengan tingkat pendidikannya masing-masing. *Kedua*, dalam proses pengembangan kurikulum sekolah inklusi sekecamatan Sewon disesuaikan dengan karakteristik/psikologis peserta didik berkebutuhan khusus yang mereka alami. *Ketiga*, adanya dukungan dari masyarakat, komite sekolah, dan pihak sekolah (*stakeholders*) menjadi faktor pendukung, serta ditambah dengan adanya dukungan biaya operasional sekolah bagi ABK dari Pemerintah Pusat. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan, kompetensi serta waktu guru dalam pengembangan kurikulum untuk anak ABK, faktor minoritas mereka dalam kelompok sekolah, masih terbatasnya waktu guru GPK dalam sekolah inklusi serta

⁹¹ Chusnul Azhar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum pendidikan kader dimadrasah muallimin muhamadiyah yogyakarta*. Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah yang diberikan untuk anak-anak ABK yang ada di sekolah inklusi.⁹²

Nusro (2012), mahasiswa Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI) Program Studi Pendidikan Islam PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis tesis dengan judul: *Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 5 Yogyakarta*. Tesis ini bermaksud untuk memperoleh informasi yang akurat tentang bagaimana proses manajemen pengembangan KTSP di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan mengurai tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan KTSP tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pada tahap perencanaan pengembangan KTSP meliputi: membentuk tim pengembangan KTSP dengan melibatkan *stakeholders*, menggunakan landasan-landasan yang tertuang dalam SNP, menetapkan kompetensi mutu lulusan, serta memberikan pelayanan pendidikan melalui: reguler, akselerasi, dan RSBI. *Kedua*, pengorganisasian pengembangan KTSP sesuai dengan pedoman dalam Standar Isi Pendidikan Nasional. *Ketiga*, pelaksanaan pengembangan KTSP secara umum meliputi: persiapan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran. *Keempat*, evaluasi pengembangan KTSP meliputi: evaluasi seleksi peserta didik dan evaluasi pelaksanaan program belajar. Adapun faktor pendukungnya pihak sekolah dalam membangun kemampuannya (*capacity building*) dalam mengembangkan KTSP sudah termasuk kategori sekolah yang berada pada tahap penyelesaian

⁹² Siswanto, *Manajemen Pengembangan Kurikulum Terpadu Sekolah Inklusi Sekecamatan Sewon Bantul Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. vi.

capacity building menuju profesionalisasi dan pelayanan yang bermutu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kebijakan pemerintah yang mengharuskan kualifikasi pendidikan guru S2 sebanyak 20% yang belum terpenuhi dan dibutuhkan pendanaan pendidikan yang cukup banyak untuk operasional sekolah.⁹³

Penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu, namun penelitian ini lebih difokuskan pada manajemen kurikulum mata pelajaran muatan lokal pada Madrasah NU Aliyah Al-Hidayah Gebog Kudus. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah NU Al-Hidayah Gebog Kudus maupun di lembaga lain. Jikalau pada beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang manajemen pengembangan kurikulum secara umum dengan focus dan kekhasan masing-masing lembaga pendidikan yang diteliti dan dilakukan di beberapa lembaga pendidikan selain MA NU Al-Hidayah Gebog Kudus. Maka, pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada manajemen pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah NU Al-Hidayah Gebog Kudus.

⁹³ Falihun Nusro, *Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 5 Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. vi.

C. Kerangka Berfikir

Kurikulum merupakan seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan bentuk operasional yang menjabarkan konsep pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang jelas akan mempermudah pendidik mengambil langkah operasional dalam proses kependidikan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pendidikan membawa pengaruh pada pendidikan termasuk di dalamnya kurikulum pendidikan pada tingkat menengah atas. Sehingga kurikulum di Madrasah Aliyah NU Al-Hidayah Gebog Kudus perlu disempurnakan untuk menyikapi berbagai perubahan tersebut. Kurikulum yang diberlakukan harus dikembangkan sesuai dengan misi di masing-masing lembaga pendidikan yang kemudian diistilahkan dengan kurikulum muatan lokal.

Kurikulum muatan lokal merupakan suatu pelaksanaan program kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional, yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan setempat dan ciri khas masyarakat tersebut.

Maka dari itu, sekolah harus dapat mengupayakan pelestarian karakteristik atau kekhasan lingkungan sekitar sekolah maupun daerah, dimana sekolah itu berada. Untuk merealisasikan usaha tersebut, maka sekolah

harus menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada peserta didik tentang apa yang menjadi karakteristik lingkungan daerahnya.

Muatan lokal, merupakan kurikulum yang berlandaskan kekuatan dan kebutuhan daerah, yang mendukung tujuan pembangunan nasional dan berwawasan global, sehingga diharapkan dapat mengantarkan anak untuk mampu bersaing dalam kehidupan global. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dirasa sangat penting untuk melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal dalam proses pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kurikulum muatan lokal.

Kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini:

